

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dengan menggunakan teori *basic analysis policy process* Patton dan Savicky, telah peneliti lakukan. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa seluruh rangkaian proses dalam analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Mulai dari mengidentifikasi masalah hingga sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender. Pada awalnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah menetapkan 12 isu strategis yang dijadikan masalah prioritas di bidang kesehatan. Sebagian besar dari isu tersebut sangat berkaitan erat dengan masalah gender di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar membatasi masalah gender di bidang kesehatan dengan fokus pada 2 program prioritas responsif gender, namun hal ini belum didukung dengan data-data yang konkrit bahwa masalah gender pada kedua program tersebut lebih urgent daripada masalah gender pada program lain. Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar masih kurang dalam penyediaan data terpilah gender. Padahal data terpilah gender sebagai data pembuka wawasan untuk membuat program/kegiatan responsif gender.

Selanjutnya pada tahapan menentukan kriteria evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar menggunakan kriteria sesuai dengan Instruksi Gubernur tentang Implementasi GAP dan GBS dalam RKA di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumbar. Salah satu dari tiga kriteria evaluasi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar adalah kriteria manfaat seperti yang diusulkan oleh Patton dan Savicky dalam analisis kebijakan.

Pada tahapan identifikasi alternatif Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar memiliki tujuh alternatif kegiatan responsif gender. Kegiatan ini terdiri dari 5 alternatif kegiatan untuk program penanggulangan penyakit menular/tidak menular dan 2 alternatif kegiatan untuk program peningkatan sumber daya kesehatan. Alternatif kegiatan ini bersumber dari alternatif kegiatan yang sudah ada yaitu dari kegiatan rutinitas. Dalam analisis kebijakan menurut Patton dan Savicky metode identifikasi alternatif seperti ini dikenal dengan metode *status quo*. Selanjutnya masing-masing alternatif tersebut dievaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar juga tidak menggunakan metode evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky.

Setelah alternatif kegiatan dievaluasi maka selanjutnya melakukan pemilihan alternatif kegiatan. Patton dan Savicky mengungkapkan bahwa sering terjadi konflik rasionalitas individu dengan rasionalitas kelompok. Namun pada tahapan ini peneliti tidak menemukan bahwa terdapat konflik saat pemilihan alternatif kegiatan responsif gender. Dan saat menyeleksi alternatif, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar memilih alternatif yang memenuhi kriteria evaluasi yang digunakan. Metode pemilihan alternatif seperti ini dikenal sebagai metode *satisficing* dalam analisis kebijakan menurut Patton dan Savicky.

Selanjutnya melakukan monev terhadap kebijakan pengarusutamaan gender. Berdasarkan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar melalui implementasi *gender analysis pathway* dan *gender budget statement* sejak tahun 2015. Namun setelah di evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender ini tidak berjalan maksimal atau tidak mencapai hasil yang diharapkan karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Patton dan Savicky menyebut hal ini terjadi *karena theory failure* atau kesalahan teori.

Dari proses monitoring dan evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui implementasi *gender analysis pathway* dan *gender budget statement* di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti halnya dalam penetapan masalah dan batasan masalah gender belum didukung dengan alasan yang jelas dan bukti-bukti yang kuat, sehingga belum tersedia bukti bahwa masalah gender pada program penanggulangan penyakit menular/tidak menular dan program peningkatan sumber daya kesehatan adalah masalah yang urgent dibandingkan masalah pada program lainnya. Selain itu pada kegiatan rutinitas yang terpilih dari beberapa program yang dijadikan prioritas responsif gender tidak terjadi perubahan tujuan sebelum dan sesudah *menggunakan gender analysis pathway*. Sehingga terkesan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar melaksanakan pengarusutamaan gender melalui implementasi *gender analysis pathway* dan *gender budget statement* sekedar melaksanakannya karena diwajibkan oleh Pemerintah Provinsi. Dan konsekuensi dari kebijakan ini belum mampu menjawab persoalan gender di bidang kesehatan.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, peneliti mengemukakan beberapa saran bagi Dinas Kesehatan maupun stakeholders lainnya, sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa dalam membuat suatu program/kegiatan yang responsif gender sangat dibutuhkannya data terpilah gender, Dinas Kesehatan maupun OPD lainnya yang menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender harus memiliki data terpilah gender. Karena data ini penting sebagai data pembuka wawasan untuk melakukan analisis gender.
2. Pemahaman tentang kebijakan pengarusutamaan gender bagi aparatur pemerintah daerah Provinsi Sumbar khususnya aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan harus ditingkatkan. Agar program dan kegiatan responsif gender yang dibuat dapat mengurangi dan mengatasi persoalan gender yang terjadi dalam proses pembangunan. Dan pemilihan program/kegiatan responsif gender juga dapat didukung dengan alasan yang kuat.
3. Pemerintah Provinsi Sumbar seharusnya memiliki alokasi anggaran khusus dan jelas untuk digunakan sebagai anggaran bagi kebijakan pengarusutamaan gender. Karena jika hanya mengandalkan anggaran rutinitas, tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan gender yang terjadi.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar maupun OPD Provinsi Sumbar lainnya seharusnya berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan

pengarusutamaan gender agar tidak terjadi lagi kesenjangan gender dalam proses pembangunan.

5. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dan OPD lainnya seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Perguruan Tinggi, LSM atau lembaga lain yang berkompeten di bidang gender. Untuk membuat rancangan kebijakan/program atau kegiatan yang responsif gender.

